



Pansus Segera Bertemu Disdukcapil

KALANGAN legislatif bakal menindaklanjuti munculnya NIK ganda dalam proses vaksinasi virus Corona di Kota Yogyakarta. Dengan harapan, temuan ini tak terulang di masa mendatang.

Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menandatangani, pihaknya hendak meminta klarifikasi dari Dinas Dukcapil setempat terkait kemunculan NIK ganda, di dalam proses vaksinasi ini.

"Pansus akan menggelar rapat dengan Disdukcapil, kita akan minta data yang NIK dobel itu. Kita agendakan, ya, setelah reses selesai, 8 Juni," katanya, Jumat (4/6).

Ia pun menyebut, polemik NIK ganda sejatinya bukan hal baru, karena sudah berulang kali terjadi. Tak sebatas pada proses vaksinasi saja, namun juga agenda-agenda yang mensyaratkan NIK seperti pesta demokrasi misalnya.

"Ini persoalan lama, dari Pilkada 2017, dan ternyata belum selesai juga. Artinya, sampai sekarang, belum ada progres yang signifikan terkait data kependudukan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, masalah NIK ganda ini merupakan kewenangan pusat dan daerah yang harus dapat disinkronkan. Menurutnya, kedua pihak tak boleh saling lempar tanggung jawab soal polemik.

"Jadi, masalahnya di pusat dan daerah. Ya, pusat memang punya data, tapi daerah yang punya kewenangan untuk menyisir, mengusulkan pembaruan data," cetusnya.

"Karena input data mesti dari daerah. Contoh, pembuatan KTP dan C1 kan di daerah, bukan pusat. Jadi, ya, harus ada penyisiran data, termasuk mencermati NIK yang masuk database penerima vaksin," pungkas Fokki. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005